Dewan Pendidikan DIY Matangkan Pendidikan Keyogyaan

KR-Franz Boedisoekamanto

Prof Dr Sutrisna Wibawa beserta rombongan saat bersilaturahmi dengan jajaran Direksi PT BP Kedaulatan Rakyat.

YOGYA (KR) - Keberadaan dewan pendidikan berfungsi sebagai pengontrol transparansi di dunia pendidikan, serta mediator antara pemerintah, DPRD, serta masyarakat. Dengan demikian keberadaan dewan pendidikan ini bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tanpa meninggalkan budaya yang ada dan menjadi kekhasan di DIY.

Dewan Pendidikan DIY tengah mematangkan konsep Pendidikan Keyogyaan yang menjadikan budaya sebagai pondasinya. Dimana dalam konsep tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, supaya siswa terus mewarisi nilai-nilai budaya.

"Sebetulnya Pendidikan Keyogyaan sudah diinisiasi sejak lama seharusnya menghargai keragaman. Tentunya dengan menekankan pada kekhasan yang ada di daerah-daerah. Selain itu juga ada pendidikan multikultural dimana didalamnya ada Pendidikan Keyogyaan," kata Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Dr Sutrisna Wibawa didampingi Timotius Apriyanto (sekretaris), Prof Dr Danisworo (wakil ketua), Dr Bernadus Wibowo Suliantoro (anggota), Totok Sudarto MPd (anggota), Cungki Kusdarjito PhD (anggota), Dr Rr Siti Murtiningsih (sekretaris 2) dan Dr Majang Palupi MBA (bendahara). Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT BP *Kedaulatan Rakyat* M Wirmon Samawi SE MIB, didampingi Komisaris Utama, Prof Dr Inajati Adrisijanti dan Imam Satriadi (Direktur Keuangan) di ruang kerja Dirut, Kamis (4/8).

Sutrisno mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Dewan Pendidikan DIY harus mampu membantu dan berperan aktif sebagai pengontrol transparansi di dunia pendidikan, serta mediator. Dengan begitu mampu mengungkapkan dan memetakan apa saja masalah pendidikan untuk kemudian membuat skala prioritas.

Sedangkan Wakil ketua dewan pendidikan DIY Prof Daniswara menyatakan, pihaknya sempat mengikuti acara forum silaturahmi dewan pendidikan tingkat nasional. Dimana salah satu isu paling gencar yang menjadi topik pembahasan adalah menghilangkan dewan pendidikan. Kondisi itu tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tapi butuh perhatian serius. Mengingat keberadaan dewan pendidikan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat, jadi harus dipertahankan.

"Kami berharap dewan pendidikan bisa dimasukkan dalam RUU Sisdiknas supaya keberadaannya bisa dipertahankan. Mengingat keberadaan dewan pendidikan sangat penting bagi masyarakat," terangnya. **(Ria)-f**

FOKUS PEREMAJAAN BANGUNAN

Rencana Revitalisasi Terminal Giwangan Disesuaikan

YOGYA (KR) - Rencana Kementerian Perhubungan RI yang akan melakukan revitalisasi Terminal Giwangan Yogyakarta terjadi penyesuaian. Terutama dengan menunda pembangunan gedung baru dan fokus pada peremajaan gedung yang sudah ada.

Menurut Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Yogyakarta Bekti Zunanta, penyesuaian dari rencana awal itu terjadi ketika jajaran Kementerian Perhubungan melakukan kunjungan ke Terminal Giwangan. "Informasi yang kami peroleh terakhir, ada penyesuaian. Tetapi realisasinya masih menunggu proses administrasi antara kementerian dengan Pemkot Yogya," jelasnya, Kamis (4/8).

Pengelolaan Terminal Giwangan Yogyakarta saat ini sudah dilimpahkan ke Kementerian Perhubungan lantaran masuk kategori terminal tipe A. Kendati demikian, aset yang ditempati gedung terminal merupakan milik Pemkot Yogya. Total lahan terminal mencapai 5,8 hektare sedangkan lahan gedung sekitar dua hektare.

Bekti menjelaskan, rencana awal dalam proses revitalisasi ialah pembangunan gedung baru di lahan kosong yang ada di kawasan Terminal Giwangan. Perencanaan tersebut bahkan sudah dilengkapi Detail Engineering Design (DED) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Alokasi anggaran itu bahkan seharusnya dikucurkan pada tahun ini. "Tetapi ada perubahan ketika pihak kementerian melakukan kunjungan ke sini. Lebih baik meremajakan gedung yang ada saat ini," tandasnya.

Pihak kementerian menilai bangunan gedung yang sudah ada dalam kondisi bagus. Konstruksi bangunan juga masih kokoh sehingga hanya perlu ada perbaikan-perbaikan dibanding harus membangun gedung baru. Akan tetapi karena lahan yang digunakan sebagai gedung terminal dikelola oleh Pemkot Yogya maka perlu ada penyesuaian administrasi. "Ini yang sekarang masih berproses. Ketika proses administrasi sudah selesai kemungkinan akan segera dilanjutkan tahap berikutnya," imbuh Bekti.

Selain peremajaan, sejumlah gedung yang telah tersedia juga sempat dikaji pemanfaatannya untuk kepentingan yang lebih luas. Seperti sebagian gedung lantai dua di kawasan terminal yang sempat diusulkan digunakan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun apakah usulan itu bisa direalisasikan atau tidak, belum dapat dipastikan. Begitu pula usulan bagian gedung lain sebagai tempat pameran hasil karya kerajinan.

Kendati demikian, Bekti mengaku revitalisasi terhadap Terminal Giwangan sangat dibutuhkan untuk kembali menghidupkan terminal sehingga memiliki nilai jual yang meningkat. Pasalnya, jika tidak direvitalisasi maka kondisinya dapat semakin memburuk dan tidak bernilai jual. "Setidaknya kalau direvitalisasi akan ada pendapatan negara bukan pajak," terangnya. **(Dhi)-f**

TURUNKAN SKOR INDIKATOR KUMUH

Pemkot Fokus ke Prenggan Gunakan APBD

YOGYA (KR) - Penataan kawasan kumuh menjadi tanggung jawab lintas sektor antara kota, provinsi dan pusat. Pada tahun ini Pemkot Yogya fokus melakukan penataan di Kampung Sambirejo Prenggan dengan menggunakan anggaran daerah atau APBD.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan, menjelaskan penataan di wilayah Sambirejo Prenggan tersebut dialokasikan Rp 1,8 miliar. "Sepenuhnya itu melalui APBD Kota Yogya di tahun ini. Penataan kawasan kumuh di lokasi tersebut menjadi satu-satunya penataan permukiman kumuh skala kawasan yang dikerjakan tahun ini," jelasnya, Kamis (4/8).

Kawasan tersebut sebenarnya sudah tidak masuk dalam skor penilaian kawasan kumuh. Apalagi pada tahun 2019 pernah dilakukan penataan menggunakan skema pembiayaan dari APBN atau pemerintah pusat. Akan tetapi masih ada persoalan sedikit yang menyangkut indikator sanitasi. Hal ini karena di kawasan tepi sungai tersebut masih banyak masyarakat yang langsung membuang limbah ke sungai.

Oleh karena itu, salah satu bentuk penataan di wilayah Sambirejo Prenggan ialah dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Terutama agar tidak ada lagi limbah yang dibuang langsung ke sungai. "Pekerjaan kami tahun ini hanya menuntaskan saja supaya skor indikator kumuh dari aspek sanitasi menjadi nol," imbuhnya.

Selain membangun IPAL komunal, dalam penataan itu juga akan dibangun jalan lingkungan tepi sungai, pembangunan pagar pembatas, penguatan talut serta penerangan jalan umum. Tahap pekerjaan juga telah dimulai sejak akhir Juni lalu dan ditargetkan selesai pada akhir November mendatang.

Sigit memaparkan, selain menggunakan dana dari APBD pihaknya sudah mengusulkan penanganan kawasan kumuh ke pemerintah pusat untuk dibiayai menggunakan APBN pada tahun ini. Akan tetapi usulan yang disampaikannya belum dapat dipenuhi tahun ini karena kebutuhan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu Pemkot Yogya hanya mengandalkan APBD untuk penanganan permukiman kumuh. **(Dhi)-f**

Memasuki Bulan Suro, Pemkot Yogyakarta Gelar Jamasan Tombak Pusaka Kyai Wijoyo Mukti

Pemkot Yogyakarta bersama Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menggelar Jamasan Tombak Pusaka Kyai Wijoyo Mukti. KR - Istimewa

YOGYA (KR) - Memasuki bulan Suro dalam kalender penanggalan Jawa, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menggelar Jamasan Tombak Pusaka Kyai Wijoyo Mukti, di Area Air Mancur, Kompleks Balaikota Yogyakarta, di Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis 4 Agustus 2022.

Jamasan pusaka kebesaran Kota Yogyakarta dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ini dilakukan langsung oleh Pejabat (Pj) Walikota Yogyakarta Sumadi, S.H., M.H., dengan Cucuk Lampah Abdi Dalem Karaton Yogyakarta KMT Harjosohaditaruno, S.E, M.M. Upacara ini dilakukan sebagai upaya untuk merawat benda pusaka yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII tahun 1921, dan sekaligus melestarikan budaya.

Prosesi diawali dengan mengeluarkan Pusaka Tombak Kyai Wijoyo Mukti dari tempat persemayamannya di ruang kerja walikota. Kemudian dikirab mengelilingi Balai Kota Yogyakarta dengan rute dari air mancur kearah timur lalu ke selatan menuju air mancur kembali. Pengiring kirab terdiri dari perwakilan Kemantren se-Kota Yogyakarta.

Setelah prosesi tiba di tempat acara jamasan, Pangarsa menyerahkan Tombak Kyai Wijoyo Mukti kepada Pj Walikota Yogyakarta untuk diletakkan di atas meja jamasan, yang telah disiapkan ubo rampe jamasan, yaitu warangan, jeruk nipis, kawul (serutan bambu), dan minyak cendana.

Pelaksanaan Jamasan Pusaka diawali pelepasan rangkaian melati yang menghiasi landheyan (pegangan tombak) dan warangka (sarung mata tombak), kemudian prosesi penjamasan sampai tahap akhir prosesi berupa pengeringan mata tombak di bawah terik matahari. Diakhiri pemasangan untaian melati pada landheyan dan pemasangan warangka mata tombak. Ditutup dengan Prosesi Kondur Pusaka Tombak Kyai Wijoyo Mukti dari tempat upacara jamasan menuju persemayaman pusaka.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti, S.Sos., M.M. menuturkan, dengan keberadaan tombak pusaka di ruang kerja tersebut, mengisyaratkan adanya pesan-pesan luhur atau simbol kekuatan moral bagi pemimpin untuk selalu berusaha memakmurkan rakyatnya yakni kemakmuran yang dinikmati oleh semua warga.

"Mensyaratkan sosok pemimpin yang tanpa pamrih bersedia ngawulo, yang siap melayani rakyatnya dalam bentuk public services yang semakin baik, yang menghargai harkat dan martabat warganya," ujarnya.

Selain itu, tegaknya pusaka membawa pesan terpadu ditegakkannya nilai-nilai kehidupan luhur, dalam upaya kita bersama membangun suatu clean goverment dan good governance yang akan membawa keharuman kota dengan segala predikatnya.

Jamasan berarti memandikan, mensucikan, merawat, dan memelihara. "Namun tidak sekedar membersihkan dan merawat fisik benda pusaka saja, akan tetapi yang lebih penting adalah memahami segenap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya untuk diingat, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni membersihkan diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

Kemeriahan penyelenggaraan prosesi jamasan pusaka Tombak Kyai Wijoyo Mukti tahun ini ditandai dengan penyelenggaraan kirab pusaka dengan iringan musik gamelan selama prosesi berlangsung. Sebelumnya, saat puncak Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19) tidak dilakukan kirab karena pusaka langsung dijamas setelah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. **(ADV)**